



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 879/IX/2015

II/SEPTEMBER 2015



DI NEW YORK DPR SERUKAN REFORMASI PBB



**KOMISI VIII DESAK
POLISI TANGKAP
PEMBAKAR HUTAN**



**PENYALURAN
BOPTN HARUS
DIOPTIMALKAN**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



DI NEW YORK DPR SERUKAN REFORMASI PBB



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Ketua Parlemen Sudan

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato di *General Debate* pada hari pertama Konferensi Ketua-Ketua Parlemen yang tergabung dalam Organisasi Parlemen Dunia (Inter Parliamentary Union- IPU) di Markas Besar PBB New York Amerika Serikat. Dalam pidato tersebut Ketua DPR RI secara lugas menyerukan reformasi di tubuh PBB terutama mengenai vote di Dewan Keamanan PBB. Setya Novanto menyampaikan bahwa peran PBB hanya bisa relevan kalau demokrasi juga diterapkan di organisasi ini khususnya di Dewan Keamanan PBB. Reformasi PBB adalah suatu keharusan dan momentum peringatan 70 tahun berdirinya PBB selayaknya dimanfaatkan untuk melaksanakan pengejawantahan demokrasi secara murni dalam tubuh PBB. Hal ini sejalan dengan sikap DPR RI yang telah disampaikan pada Konferensi Parlemen Asia Afrika di Jakarta, Indonesia, April 2015.

Menanggapi tema Konferensi tahun ini tentang isu kesehatan dan kesejahteraan, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas keamanan. Sedangkan perdamaian dan stabilitas hanya dapat terjadi dalam iklim demokrasi.

Namun lanjutnya, dalam menyikapi demokrasi selayaknya

kita tidak terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Sehingga nexus (saling ketergantungan) antara perdamaian, stabilitas dan demokrasi sebagai syarat mutlak pembangunan berkelanjutan dapat terjaga dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga negara.

Dalam pidatonya, secara lantang Ketua DPR RI menyampaikan bahwa “Demokrasi seringkali hanya menjadi prosedur demokrasi, bukan substansi perjuangan aspirasi rakyat. Demokrasi seharusnya bisa melindungi semua: minoritas dan mayoritas. Demokrasi harus diterapkan konsisten tak hanya di negara masing-masing tapi juga dalam pergaulan internasional. Termasuk di PBB ini, demokrasi belum menjadi tradisi organisasi. Diperlukan evaluasi sistemik melalui reformasi PBB yang konkrit yaitu meninjau ulang tata kelola organisasi sehingga setiap negara bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”.

Konferensi Tingkat Tinggi Ketua-Ketua Parlemen anggota IPU yang berlangsung setiap 5 tahun sekali ini dibuka oleh Presiden IPU, Saber Chowdury dan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon. Selain itu menghadirkan pula aktor sekaligus Utusan Khusus UNESCO untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi, Forest Whitaker sebagai *keynote speaker*.

Di sela-sela Konferensi yang berlangsung dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2015, Ketua DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Jerman, Ceko, Iran, Kroasia, Finlandia, dan Sudan. Secara umum pertemuan bilateral tersebut membahas sinkronisasi upaya masing-masing parlemen untuk meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara, terutama melalui pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

Demikian pula dengan pertemuan bilateral dengan Parlemen Sudan, selain untuk berkenalan dengan Ketua Parlemen yang baru dilantik bulan Juni lalu juga untuk membahas lebih lanjut mengenai ketertarikan Sudan untuk membentuk Sekretariat Forum Parlemen Asia Pasifik di negaranya sebagai follow up hasil forum parlemen dalam peringatan 60 tahun KAA di Jakarta bulan April 2015. Dibahas pula mengenai ketertarikan Sudan untuk mengembangkan kerja sama pertambangan selain minyak mengingat Sudan memiliki potensi tambang mineral. (BKSAP/mp) foto: dok. BKSAP/parle/hr



DPR TEMUKAN PEKERJA ASING DI BANTEN



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Anggota Komisi IX saat meninjau pabrik Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Banten

Untuk menjawab kesimpang-siuran keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten, Wakil Ketua DPR Bidang Korkeasra Fahri Hamzah beserta anggota Komisi IX DPR mengambil inisiatif mendatangi langsung perusahaan yang terindikasi mempekerjakan TKA yaitu pabrik Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Banten, Rabu sore (9/9/2015).

Usai bertemu Gubernur Banten, Tim Kunjungan Kerja Spesifik dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi tiga orang Anggota Komisi IX DPR M. Ali Taher (Fraksi PAN), Siti Masrifah (Fraksi PKB) dan Djoni Rolindrawan (Fraksi Hanura) melanjutkan perjalanan ke pabrik Semen Merah Putih.

Walau dihadang medan yang cukup berat, perjalanan darat selama 5 jam naik turun bukit dengan kondisi jalanan berlobang dan berdebu karena sedang dalam perbaikan, konvoi rombongan anggota DPR tanpa istirahat mampu mencapai

lokasi pabrik yang berada tepat di atas perbukitan pinggir pantai Kecamatan Bayah, Lebak, Banten sekitar pukul 16.00 WIB.

Setiba di lokasi rombongan diterima oleh jajaran Direksi PT. Cemindo Gemilang, Aparat Pemkab Lebak serta Camat Bayah untuk mendengarkan pemaparan sekilas mengenai sejarah pendirian perusahaan produsen Semen Merah Putih. Menurut Direksi Cemindo, pabriknya menempati area seluas 500 Hektare dimana peletakan batu pertama dilakukan pada 11 September 2013 oleh Menko Perekonomian saat itu Hatta Rajasa. Proyek tersebut bagian dari program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Total investasi pembangunan seluruh fasilitas pabrik mencapai USD 600 juta.

“Kami datang untuk mengklarifikasi ada laporan di berbagai media bahwa ada Tenaga Kerja Asing *unskilled* (tanpa keahlian) asal Tiongkok yang dipekerjakan di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan fokus pada permasalahan tersebut. Menurut Fahri, jika praktek tersebut ada maka tidak sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan Menteri Tenaga Kerja.

“Hanya pekerja yang memenuhi syarat keahlian khusus yang diizinkan bekerja di Indonesia, karena itu kami (DPR) ingin memastikan persyaratan tersebut bisa ditunjukkan Cemindo,” tegas Fahri.

Menanggapi hal tersebut, pihak Cemindo mengakui masih ada 274 TKA asal Tiongkok yang masih dipekerjakan untuk menyelesaikan proyek di pabrik Semen Merah Putih. “Hingga 4 September 2015 masih ada 231 TKA asal Tiongkok dari Sinoma Project dan 43 TKA dari China Harbour yang mengerjakan pelabuhan,” kata Sigit Indrayana, General Manager PT Cemindo mengklarifikasi. (oji) foto: naefuroji/parle/hr

DPR DUKUNG PEMERINTAH BERI KEPASTIAN HUKUM DAN INVESTASI

Delegasi DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto menyatakan, Indonesia memberikan kesempatan luas bagi para calon investor potensial dari luar negeri untuk melakukan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Untuk itu DPR mendukung kebijakan pemerintah yang memberi kepastian hukum dan investasi bagi perusahaan-perusahaan asing termasuk dari Amerika Serikat.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan anggota delegasi DPR ketika mengadakan beberapa pertemuan dan diskusi di Washington DC, Amerika Serikat Kamis (10/9). Serangkaian acara dilakukan Delegasi DPR yakni Diskusi dengan US – ASEAN Business Council, Pertemuan dengan Presiden Tempore Senat Amerika Serikat, Orrin Hatch, Diskusi di USINDO (US – Indonesia Society), Pertemuan dengan Ketua DPR Amerika Serikat, John Boehner dan Kunjungan ke Library of Congress.

Para pengusaha AS antara lain pimpinan korporasi Coca Cola, Philip Morris, General Electric, dan Freeport. US-ASEAN Business Council terdiri dari 140 perusahaan terkemuka AS.



Pimpinan DPR RI saat pertemuan dengan Presiden Tempore Senat Amerika Serikat, Orrin Hatch

Dalam pertemuan dibahas kerjasama yang telah berlangsung dan peluang-peluang usaha serta pengembangan kerja sama ekonomi. Para pengusaha AS menanyakan kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Mereka menyampaikan masih adanya berbagai kendala investasi di Indonesia terkait regulasi yang kurang kondusif maupun kurangnya

kepastian investasi.

Delegasi DPR menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan proses investasi dan deregulasi kebijakan. Deregulasi meliputi penyederhanaan sekitar 160 peraturan di bidang investasi, industri, dan perdagangan.

Sementara itu, Senator Hatch menghargai kunjungan Ketua DPR. Hubungan Indonesia-AS dipandang penting oleh Hatch terutama karena Indonesia adalah negara demokrasi yang besar dengan wilayah yang luas. Posisi Indonesia penting terutama menghadapi isu-isu regional dan global.

Sebagai mitra penting Indonesia, DPR mengharapkan Senat AS mendukung berbagai kesepakatan kerjasama

bilateral kedua negara, diantaranya terkait kerjasama maritim, pertahanan dan perdagangan.

DPR juga mengharapkan kerjasama antarpallemen bisa lebih ditingkatkan. Indonesia dan AS sudah memiliki Kaukus parlemen Indonesia-AS, namun diharapkan hubungan lebih baik. Hatch menyambut baik tawaran tersebut. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar, DPR mengharapkan AS turut menjaga terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat menyinggung perlunya perhatian bersama RI-AS di kawasan, khususnya dalam menangani masalah yang berkembang di Laut Cina Selatan. (bksap,mp) foto: denus/parle/hr

Standar Pendidikan ASEAN Disetujui Komisi Sosial AIPA



Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang AIPA Malaysia

Standar Pendidikan Tinggi di ASEAN dan Perlindungan terhadap Masyarakat Usia Lanjut yang diusulkan Delegasi Parlemen Indonesia, disetujui masuk dalam draft Resolusi Bidang Sosial Sidang Umum ke 36 AIPA yang diselenggarakan di Kualalumpur, Malaysia, Rabu (9/9/2015).

“Alhamdulillah kedua usulan tersebut dapat diterima, karena sebelum sidang kami sudah membicarakannya terlebih dahulu terutama mengenai perlindungan terhadap orang dengan usia lanjut dan kebetulan kebanyakan Anggota Delegasi pada komisi ini perempuan yang mengerti

terhadap pentingnya kesehatan dan perlindungan usia lanjut,” papar Anggota Delegasi Parlemen Indonesia, Nihayatul Wafiroh, usai sidang.

Terkait standar pendidikan tinggi, katanya, Indonesia mengusulkan agar pendidikan tinggi di Asia memiliki standar yang sama dan bisa dilakukan kerjasama dengan universitas-universitas lain.

“Akhirnya pendidikan tinggi yang diberikan kepada masyarakat kita bisa setara semua,” imbuh Anggota BKSAP dari fraksi PKB ini.

Sebagaimana diketahui, lanjutnya, di Asia untuk tingkat pendidikan tinggi masih sangat rendah.

“Dengan support dari AIPA ini, kita berharap tidak hanya Indonesia tetapi seluruh negara Asia ini penduduknya bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi,” harap Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Sementara terkait perlindungan terhadap usia lanjut, dirinya berpikir, Indonesia dengan populasi besar dimana akhirnya nanti akan lebih banyak masyarakat dengan usia lanjutnya dari pada usia produktifnya.

“Kita harus berpikir, bagaimana bisa menjadikan orang-orang usia lanjut ini mempunyai produktivitas yang bagus, mereka juga tetap bisa bergerak dan kita melindungi mereka,” tegasnya. (sc) foto: suciati/parle/hr

SEPTEMBER 2015 PENYERAPAN ANGGARAN KEMENAG BELUM SAMPAI SETENGAHNYA

Anggota Komisi VIII DPR RI, Anda mengkritisi rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Agama yang baru mencapai 45,8 persen per September 2015 ini. Padahal hanya tersisa waktu tiga bulan untuk bisa menyerap anggaran 2015 yang sudah ditetapkan bersama. Hal tersebut diungkapkannya saat Rapat Kerja Komisi VIII de-

ngan Menteri Agama, Lukman Hakim S, Rabu (9/9) di Senayan Jakarta.

“Tahun 2014 lalu Kemenag hanya mampu menyerap anggaran sekitar 88 persen, dan sisanya sebesar 12 persen kembali ke kas negara. Tahun 2015 Per 9 September ini penyerapan Kemenag baru mencapai 45, 8 persen, belum ada setengah anggaran yang digu-



Anggota Komisi VIII DPR H. Anda

nakan, padahal waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Saya berharap agar penyerapan anggaran yang masih sisa sekitar 12 persen tidak terulang lagi di tahun 2015 ini,” ungkap Anda.

Padahal menurut Anda anggaran yang tersisa itu seharusnya bisa digunakan untuk melakukan berbagai perbaikan keagamaan, khususnya di bidang pendidikan agama Islam yang selama ini dirasanya masih sangat kurang.

“Di Kabupaten Lebak, yang merupakan daerah pemilihan saya sekolah madrasah hanya ada 2, tsanawiyah 4 dan Aliyah 2. Sedangkan sekolah umum yang notabene berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, dalam satu kecamatan sudah lebih dari itu. Belum lagi

minimnya fasilitas yang didapat oleh sekolah pendidikan agama. Ini sangat memprihatinkan. Padahal pemerintah sudah menjanjikan mengalokasikan 20 persen APBN untuk bidang pendidikan,” papar Politisi dari fraksi Partai Gerinda ini.

Sementara itu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran itu disebabkan karena perbedaan akun 57 menjadi 52 (belanja barang) dalam proses pelaksanaan penyampaian bantuan. Selain itu juga terjadi keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang disebabkan perangkat pembayaran, seperti PPK (Pejabat pembuat komitmen) dan pejabat pengadaan terlambat ditetapkan.

kan. Bahkan, Menag juga mengakui seluruh satker belum menyusun dan melaksanakan jadwal pelaksanaan anggaran dengan optimal.

“Menteri juga mengakui ketidaksiapan terhadap proses lelang jadi menghambat penyerapan anggaran, dimana lelang dilakukan setelah bulan Juni, setelah verifikasi terhadap yang diberikan bantuan. Seharusnya verifikasi dilakukan pada bulan Januari-Februari, sehingga bulan Mei-Juni bisa dilakukan pembayaran. Dengan begitu penyerapan anggaran akan berjalan optimal. Semua itu sejatinya didasarkan atas niat baik, kalau ada *good will* semua pasti akan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Ayu/Dhi) foto: naefuroji/parle/hr

KOMISI X SERAP MASUKAN RUU KEBUDAYAAN DI SUMUT



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR saat pertemuan dengan Sekda, Akademisi dan Tokoh Adat Sumut

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan yang sedang dirumuskan oleh Komisi X DPR RI, terus memperkaya masukan dan aspirasi dari para tokoh adat dan akademisi di daerah. Kali ini, Komisi X menyerap masukan berharga dari tokoh dan akademisi di Sumatera Utara (Sumut).

RUU Kebudayaan yang merupakan inisiatif DPR ini, terus dimatangkan pembahasannya setelah tiga periode keanggotaan DPR (15 tahun) tak kunjung bisa diundangkan. Bertempat di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (9/9), tim kunjungan kerja (kunker) Komisi X mendapat masukan penting di Sumut yang sangat kaya dengan keragaman budayanya. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekda Sumut, para kepala

dinas, dosen, dan tokoh adat.

Nuroji yang juga Wakil Ketua Komisi X ini, kembali menjelaskan bahwa ada delapan pilar pembangunan kebudayaan di Indonesia. Pertama, katanya, penguatan hak kebudayaan. Kedua, pembangunan karakter bangsa. Ketiga, pelestarian sejarah. Keempat, pembinaan kesenian. Kelima, pengembangan industri kreatif. Keenam, penguatan diplomasi budaya. Ketujuh, pengembangan pranata dan SDM kebudayaan. Dan terakhir, pengembangan sarana dan prasarana budaya.

“Dari beberapa pilar pembangunan kebudayaan di atas, kunjungan kerja ke Sumatera Utara ini paling tidak kami mengharapkan mendapat masukan penguatan hak berkebudayaan, pem-

angunan jati diri dan karakter bangsa melalui warisan sejarah Kesultanan Deli,” kata Nuroji dalam pertemuan tersebut.

Sekda Sumut Hasban Ritonga menjelaskan, di Sumut masing-masing etnis memiliki kearifan sendiri-sendiri. Ada delapan etnis di Sumut, yaitu Melayu, Batak Toba, Karo, Simalungun Pakpak, Angkola, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Kedelapan etnis ini memiliki bahasanya masing-masing. Dan sudah ada Peraturan Gubernur untuk melindungi kekayaan etnis di Sumut ini.

Para budayawan di Sumut sangat mendukung lahirnya UU yang mengatur tentang kebudayaan ini untuk melindungi warisan kebudayaan nasional. Dengan UU ini ada payung hukum bagi pemerintah untuk bertindak menyelamatkan kearifan lokal. Ada sedikit masukan soal istilah dari tokoh dan budayawan Melayu. Kata ‘kebudayaan daerah’ dan ‘bahasa daerah’ dalam RUU ini mestinya diganti menjadi ‘kebudayaan etnik’ dan ‘bahasa etnik’.

Tim kunker Komisi X yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Abdul Kharis Almayshari (F-PKS), Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Mujib Rohmat (F-PG), Sutan Adil Hendra (F-Gerindra), Ida Bagus Putu Sukarta (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), Lathifah Shohib (F-PKB), dan Reni Marlinawati (F-PPP). (mh) foto: husen/parle/hr

SITUS KOTA CINA DI MEDAN HARUS SEGERA DIREGISTRASI

Temuan arkeologi berupa candi dan berbagai artefak di kawasan yang dinamakan Situs Kota Cina, harus segera diregistrasi oleh Pemda setempat kepada pemerintah pusat. Kawasan ini berada di Marelan, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Tim Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerjanya, Rabu (9/9), mengimbau Pemda setempat untuk menginisiasi perlindungan cagar budaya yang sangat berharga itu. Langkah pertama yang harus dilakukan Pemda adalah mengajukan registrasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar pemerintah pusat bisa campur tangan melindungi situs ini dengan mengalokasikan anggarannya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji (F-Gerindra) yang memimpin tim kunker ini mengatakan, temuan situs tersebut sangat luar biasa dan harus dilindungi. “Pemda harus diajak peduli dengan temuan luar biasa ini. Bila belum memiliki anggaran untuk menyelamatkannya, setidaknya bisa segera mendaftarkan situs ini kepada pemerintah pusat. Dengan mendapat registrasi, situs ini akan mendapat perlindungan sebagai cagar budaya.”

Adalah Ichwan Azhari, dosen Universitas Medan, yang begitu peduli menjaga kawasan situs tersebut. Pada 2009 dia mendirikan Museum Situs Kota China. Di dalam museum kecil itu, tersimpan berbagai artefak berupa emas, patung, keramik, rangka perahu, kayu purba, koin, patung Buddha, hingga batu besar dari ledakan gunung Sinabung purba. Kawasan situs ini dahulunya merupakan pelabuhan niaga internasional pada abad ke-12 hingga ke-14 M.

Kawasan yang menempati tepi Danau Siombak, Kecamatan Paya Pasir itu, merupakan kawasan situs arkeologi yang kini dihuni oleh banyak kepala keluarga. Di tempat ini ada temuan candi yang keberadaannya persis di bawah rumah penduduk setempat. Setiap kali ada penggalian di areal ini, selalu ditemukan artefak. Kawasan kompleks cagar budaya ini, memang membutuhkan pembebasan lahan untuk melindunginya.



Tim Kunspek Komisi X DPR foto bersama di kawasan Situs Kota Cina

Pemerintah pusat dan daerah perlu memberi perhatian lebih pada situs Kota Cina tersebut.

Para peneliti Prancis malah sudah berdatangan ke lokasi ini untuk mendapatkan banyak temuan penting di sini. Situs ini juga sudah dikunjungi oleh Wali Kota Medan dan petinggi daerah setempat. Namun, sekali lagi Pemda berkilah tak berdaya menyelamatkan situs ini, karena tak memiliki pos anggaran.

Anggota Komisi X Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), menyerukan, bila Pemda dan pemerintah pusat tak juga tergugah menyelamatkan situs ini, Komisi X DPR akan bergerak menyelamatkannya. “Komisi X harus sering-sering berkunjung ke sini,” katanya usai melihat museum.

Penelitian atas kawasan situs ini sebetulnya sudah berlangsung lama. Tercatat sejak tahun 1826 ada John Anderson peneliti dari Inggris yang telah menemukan situs ini. Pada 1972 ada peneliti Inggris lainnya Edward Mc Kinnon yang juga pernah mendarangi situs ini. Para peneliti Indonesia juga bergantian mendarangi situs tersebut. Sejak tahun 1973 hingga 2014. Kini, penelitian dilanjutkan oleh Ichwan Azhari.

Kepada tim kunker Komisi X DPR, Ichwan mengeluhkan, belum ada respon kepedulian dari pemerintah untuk melindungi kekayaan cagar budaya luar biasa ini. Ia berjuang sendiri menjaga situs ini dari kerusakan. (mh) foto: husen/parle/hr

SIDANG, BADMINTON DAN LOBI



Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim saat pembukaan turnamen badminton dalam rangka hari jadi Partai Demokrat ke-14

Bisa dipastikan sebagian besar waktu anggota DPR selama berada di gedung dewan adalah bersidang, berbicara, adu argumen baik dengan mitra kerja maupun kolega sesama anggota legislatif. Silang pendapat bisa jadi melelahkan dan terkadang berakhir buntu tanpa solusi. Tidak jarang titik tengah dari perbedaan itu berhasil dibuat dalam forum lobi informal, seperti di lapangan badminton.

“Iyalah tidak jarang kebekuan di persidangan justru cair di lapangan, jadi badminton ini bisa jadi forum lobi sehingga putusan bisa segera ditetapkan,” kata Wakil Ketua Komisi II Wahidin Halim disela-sela pelaksanaan turnamen badminton dalam rangka hari jadi Partai Demokrat ke-14 di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/15).

Ketika bicara politisi FP Demokrat dari dapil Banten III ini sempat melambaikan tangan kepada koleganya dari Fraksi PDIP Aria Bima yang baru saja memasuki GOR masih men-

genakan pakaian kerja. “Kita ketemu di final!” teriaknya disambut tawa dan acungan jempol lawan bicaranya.

Turnamen yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh anggota DPR, karyawan setjen, tenaga ahli dan asisten anggota Dewan. Tema yang dipilih panitia adalah; ‘Dengan Badminton Kita Tingkatkan Rasa Persatuan, Nasionalisme dan Humanisme’.

Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setyanta Nugraha yang juga ikut sebagai peserta turnamen menambahkan peran olah raga khususnya badminton sebagai sarana untuk mendukung peningkatan etos kerja. Itulah sebabnya agenda seperti ini diadakan secara berkala.

“Kita saat ini juga sedang mempersiapkan turnamen yang

akan melibatkan mitra kerja DPR dari kementerian dan lembaga. Waktu yang tepat masih dibicarakan, nanti kita akan informasikan, “ tutur penasehat Klub Badminton Parlemen Senayan ini.

Untuk menambah semangat peserta turnamen menurut Ketua Panitia Effendi, pertandingan yang dibagi dalam empat pool ini menerapkan hitungan jumlah poin total sebagai penentu untuk melaju ke babak selanjutnya. “Dengan penentuan hitungan poin total maka semua pemain punya peran untuk kemenangan timnya. Ini akan menambah semangat peserta dalam turnamen persahabatan ini,” pungkask dia. (iky)

foto: rizka/parle/hr

RUU Pertembakauan Akomodir Semua Kepentingan

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno memastikan, Rancangan Undang-undang Pertembakauan yang saat ini sedang dibahas, akan mengokomodir dan menyeimbangkan semua kepentingan. Diantaranya kepentingan industri, petani, perdagangan, keuangan, hingga periklanan terkait tembakau.

Demikian disampaikan Hendrawan di sela-sela audiensi antara Baleg DPR dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Prof Dr Hamka, di Gedung Nusantara I, Rabu (9/09/15). Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo.

“Kami ingin berbagai kepentingan ini bermuara dalam satu ekuilibrium, keseimbangan, dan harmonisasi dari berbagai kepentingan ini. Itulah mengapa RUU Pertembakauan ini dilahirkan,” tegas Hendrawan.

Terkait aspirasi perwakilan BEM ini yang tegas menolak RUU Pertembakauan, Hendrawan menilai, karena mahasiswa hanya melihat dari aspek kesehatan saja, tidak secara menyeluruh. Mahasiswa menegaskan, tembakau dan produk turunannya banyak menciptakan mudarat dan tidak bermanfaat. Bahkan, mereka mengira, RUU Pertembakauan ini seolah-olah melindungi pelaku industri rokok.

“Kami sampaikan justru tidak. Kalau mahasiswa ini melihat dari segi kesehatan, kenapa tidak dilarang saja pere-

edaran rokok. Sehingga para perokok ditangkap, bahkan pabrik rokok juga ditutup. Tapi kan tidak bisa seperti itu,” kata politikus F-PDI Perjuangan itu.

Namun, apapun aspirasi itu, Hendrawan memastikan akan tetap menjadi pertimbangan Baleg dalam membahas RUU Pertembakauan. Dengan catatan, jika ada yang menolak RUU ini, maka harus memberikan formulasinya.

“Untuk itu, mari kita kawal pembahasan RUU ini bersama-sama. Dengan prinsip, jangan ada dusta diantara kita. Kita kawal dengan baik. Sehingga regulasi ini dapat menampung berbagai kepentingan,” kata politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu, sambil meyakinkan bahwa pembahasan dapat selesai dalam kurun waktu 3-4 masa sidang.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota Baleg DPR Mukhammad Misbakhun (F-PG) menilai, industri tembakau merupakan industri strategis domestik. Sehingga, perlu ada landasan hukum dalam pelaksanaannya.

“Tembakau juga memiliki kontribusi besar pada keuangan negara melalui cukai yang muncul dari luasnya distribusi dan konsumsi komoditas tembakau. Dan tembakau adalah komoditas yang penting bagi petani Indonesia, karena memiliki signifikansi bidang pertanian, keuangan dan juga perdagangan,” kata politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Ketua BEM Fakultas Kesehatan, Iksan, mempertanyakan maksud DPR RI memasukkan RUU Per-



Anggota Baleg DPR Hendrawan Supratikno

tembakauan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pasalnya, hasil penelitian menyebutkan, rokok bisa meningkatkan probabilitas 63,1% bagi laki-laki untuk mengonsumsi ganja.

“Kami aliansi yang bergerak di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dari Sabang sampai Merauke yang diwakili oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di ruangan ini, kami menolak RUU Pertembakauan dibahas pada tahun 2015,” tegas Iksan.

Iksan menegaskan, pihaknya menolak RUU Pertembakauan bukan dikarenakan mahasiswa jurusan kesehatan, namun pihaknya sudah mengkaji dari aspek ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Sementara terkait cukai yang dihasilkan dari penjualan rokok, Iksan menegaskan bahwa itu *sin tax* (pajak dosa).

“Kenapa harus mencari uang dari memeras kesehatan dari masyarakatnya. Jika memang tujuannya adalah uang silakan berdayakan keuangan yang ada, tetapi jangan kesehatan,” tegas Iksan. (sf) foto: jaka/parle/hr

Tiga Usulan DPR Disetujui Sidang Komite Politik AIPA

Tiga usulan politik delegasi DPR RI disetujui pada Sidang Komisi Bidang Politik ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (9/9/2015). Delegasi Parlemen Indonesia di Komite Politik diwakili oleh Indro Hananto (F-PG) dan Muhammad Syafruddin (F-PAN).

Ketiga usulan tersebut yakni, pertama menyangkut isu *good governance* untuk menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kedua, soal *money laundering*. Dan, ketiga tentang terorisme. Ketiga usulan ini disepakati akan menjadi fokus AIPA ke depan dalam bidang politik di wilayah ASEAN.

“Sebetulnya, kami menawarkan 4 usulan, namun usul mengenai korupsi tidak disepakati. Akhirnya, ketiga poin itu kita tawarkan, dan alhamdulillah ketiganya bisa disepakati. Itu menurut saya luar biasa,” kata Indro Hananto yang juga anggota BKSAP DPR.

Terkait terorisme ia menekankan pentingnya kerja sama sejumlah pihak untuk membangun dialog. “Pada usulan soal terorisme, diharapkan ada kerja sama terutama dialog agama dan budayawan supaya rasa ekstrem bisa berkurang.”

Sementara dalam sidang komisi

lainnya yang membahas soal ekonomi, Indonesia diwakili oleh Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani. Tiga hal menjadi kesepakatan dalam sidang itu yang dua di antaranya merupakan usulan Indonesia dan satu usul dari delegasi Parlemen Vietnam.

“Dalam komite ekonomi tadi dibiarkan 3 resolusi. Pertama *trade and industry, narrowing the gaps*, dan ketiga bagaimana melancarkan perekonomian di ASEAN,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan itu, usai sidang.

Wiryanti menjelaskan, ada dua usulan yang disampaikan Delegasi Indonesia. Pertama, soal *time zone*, dan kedua soal perdagangan antar negara. “Malaysia tadi mengusulkan satu *time zone*, kita tak setuju, karena negara kita luas, dan ini akan menurunkan produktivitas, karenanya kita tetap 3 *time zone*. Kedua soal perdagangan antarnegara, karena kan nanti Desember akan berlaku Masyarakat Ekonomi Asean yang antara lain *free trade, investment dan skill labour movement*,” imbuh Wiryanti.

“Masing-masing negara harus menghargai regulasi ini. Memang kita memberikan rekomendasi kepada masing-masing negara untuk memberikan



Anggota BKSAP DPR Indro Hananto

perhatian pada MEA. Tapi bukan berarti negara itu tidak punya peraturan. Kita harus tetap menghargai peraturan yang ada di negara itu,” tambah politikus asal dapil Jakarta itu.

Dalam kesempatan itu, lanjut Wiryanti, Indonesia juga menyoroti perihal MEA yang akan berlaku Desember mendatang. Karena itu, Indonesia menekankan agar MEA yang diikuti pergeseran arus manusia jangan sampai merugikan salah satu negara-negara ASEAN. (sc) foto: suci/parle/hr

DPR MINTA DANA TRANSFER DAERAH DAN DANA DESA DIKELOLA DENGAN BENAR

Anggota Komisi XI Nurdin Tambubolon sangat mengapresiasi langkah pemerintah terkait besaran dana transfer ke daerah dan dana desa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Dana transfer ini akan dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Saat ini pemerintah berhasil membangun negeri ini seperti keinginan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo,” kata Nurdin di sela-sela rapat dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Gedung Nusantara I, Selasa (8/09/15).

Politikus F-Hanura ini menilai, peningkatan jumlah anggaran tersebut dinilai



Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tambubolon

sebagai upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat. Namun ia memberi catatan, kedua dana ini harus dikelola dengan benar.

“Anggaran transfer ke daerah dan

dana desa yang akan dikucurkan itu, sebaiknya dikelola dengan benar. Tak hanya di kota, namun perlu juga membangun perekonomian di pedesaan,” pesan Nurdin.

Politikus asal daerah pemilihan Sumatera Utara ini juga mengingatkan Pemerintah, untuk kedepannya, agar APBN diperoleh dari dana fundamental dalam negeri, supaya tidak mengandalkan lagi utang luar negeri.

“Pemerintah perlu mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) semakin bertumbuh,” pesan Nurdin.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Airlangga Hartanto menyatakan mekanisme penyaluran transfer ke daerah dan dana



desa saat ini semakin membaik dengan menggunakan mekanisme yang baru.

Politikus F-PG ini menilai, program yang dibuat pemerintah tersebut mencerminkan sebuah perkembangan mengelola anggaran desa, apalagi kedudukan menteri keuangan adalah bendahara negara.

“Saya berharap agar pencarian DAK tersebut segera direalisasikan. Mengingat, bila pemerintah menundanya, maka proyek di sejumlah daerah akan terlambat pula,” imbuh politikus asal daerah pemilihan Jawa Barat itu.

Sebagaimana diketahui, dana Transfer Desa di RAPBN 2016, dialokasikan

sebesar Rp 782,2 triliun, yang terdiri dari anggaran transfer daerah sebesar Rp 735,2 triliun dan dana desa mencapai Rp 47 triliun. Angka ini melesat signifikan dibanding APBN 2015 yang hanya sebesar Rp 664 triliun. (sf) foto: [jaka/parle/hr](#)



Anggota Komisi VIII DPR Endang Maria Astuti

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini sudah dalam kondisi darurat. Fenomenanya bukan saja di Jakarta, akan tetapi sudah merambah ke seluruh pelosok Indonesia. Karena itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) supaya melakukan koordinasi dengan aparat serta masyarakat, karena selama ini penanganan kasus kekerasan seksual masih kurang maksimal.

Hal ini dikemukakan anggota DPR Endang Maria Astuti sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Agama diruang rapat Komisi VIII Rabu (9/9) siang.

Politisi PG ini berharap agar Presiden

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SUDAH KONDISI DARURAT

Jokowi berani mengumumkan bahwa saat ini kondisinya sudah darurat seksual, sehingga perlu diambil langkah-langkah efektif agar aset bangsa itu bisa diselamatkan. “Jangan beban masyarakat kian berat, masalah ekonomi sudah morat-marit ditambah maraknya kasus kekerasan seksual,” tegas dia.

Dalam kaitan ini anggota Komisi VIII (bidang agama dan PPPA) menyoroti masih minimnya anggaran untuk mengatasi kekerasan terhadap anak sehingga perlunya tambahan anggaran. Bagaimana mau memberdayakan anak dan perempuan kalau anggarannya yang belum maksimal.

Terlebih-lebih kata Endang, sekarang kasus kekerasan seksual kepada anak marak luar biasa, hampir di semua propinsi muncul kasus tersebut. Dia berharap, Kementerian PPPA menyusun program pencegahan kasus-kasus seksual.

“Program itu disosialisasikan tidak

saja kepada kaum ibu dan anak-anak perempuan, namun juga kepada kaum laki-laki, karena tidak sedikit kasus kekerasan seksual timbulnya dari sana. Juga di desa-desa, kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau kerabatnya,” kata Endang.

Selain upaya pencegahan, Endang berharap perlunya diintensifkan pemahaman agama kepada masyarakat, jangan hanya memahami agama sepotong-sepotong tetapi secara keseluruhan.

Terkait upaya yang didengungkan Presiden Jokowi tentang revolusi mental, dia menilai omong kosong. Pernyataan itu sudah hampir satu tahun tetapi belum ada perubahan yang signifikan. Mestinya harus ada langkah cepat, karena kasus ini muncul sudah setengah tahun yang lalu, tetapi penanganannya dan dukungan anggarannya belum maksimal. (spy,mp), foto : [naefuroji/parle/hr](#).

Komisi III Usulkan DPR Bentuk Pansus Pelindo II



Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Badrodin Haiti yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedia Pandjaitan Selasa (8/9) siang, memutuskan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Pansus dibentuk tidak hanya melibatkan satu Komisi tetapi lintas Komisi yaitu Komisi V, VI, dan XI.

Dalam raker tersebut kasus penggeledahan kantor Dirut Pelindo II menjadi topik bahasan yang cukup hangat. Sebagaimana dikatakan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengutip pernyataan Menteri BUMN Rini Soemarno yang memprotes Kapolri atas penggeledahan kantor Pelindo II baru-baru ini.

“Cara yang dilakukan Polri penggeledahan itu dinilai sa-

ngat arogan,” ujar Junimart Girsang mengutip protes Menteri BUMN. Padahal lanjutnya, penggeledahan tersebut sudah mendapat izin dari Pengadilan. Masyarakatpun menilai bahwa Menteri BUMN perlu dicurigai dan meminta agar Rini Soemarno juga diusut dan diperiksa.

Untuk itu ia menekankan semua masyarakat menginginkan agar penindakan dan penegakan hukum dilakukan sesuai aturan yang berlaku bagi siapa saja. “Kita tidak mau penegakan hukum ini dibelokkan, dengan dasar isu bahwa tindakan dari Polri telah mengganggu kegiatan ekonomi di negara ini. Hal inilah yang membikin gaduh, mengganggu kegiatan ekonomi. Padahal ekonomi harus di bangun secara bersih dan tidak membiarkan pelanggaran terjadi,” tegasnya lagi.

Sementara anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Susatyo mengatakan, dari yang disampaikan rekannya Junimart, rasanya urusan dengan Rini Soemarno belum kelar. “Ibarat rumah tangga, ini bapak memecahkan televisi, istri memecahkan kualiti, anak membakar kasur, kemudian yang gaduh rumah tangga sendiri tetapi tetangga yang disalahkan,” jelasnya.

Sebetulnya, kata politisi FPG ini, mengenai pergantian jabatan itu sudah biasa. “Kami tidak mempersoalkan figur-

figur pengganti dan yang digantikan, tapi proses kesana yang tidak biasa itulah yang mengundang banyak tanya. Banyak indikasi kegaduhan itu berasal bukan dari Polri bukan dari DPR, tetapi sesungguhnya berasal dari istana sendiri,” tukas Bambang.

Yang pertama, gaduh dimulai ketika Polri menetapkan BW sebagai tersangka, Presiden memberikan komentar. “Saya tidak bilang ini bentuk intervensi, tetapi bentuk komentar,” jelasnya.

Dalam kasus Novel Baswedan, Presiden bahkan memerintahkan Kapolri membebaskan dan tidak menahannya. Lalu dalam hal-hal lain juga banyak komentar-komentar yang sesungguhnya berpotensi membuat kegaduhan dan terakhir soal Pelindo II.

“Saya berkeyakinan, jika Istana tidak memberikan komentar atas berbagai aksi penegakan hukum maka tidak terjadi kegaduhan. Biarkanlah penegak hukum berjalan dengan apa yang menjadi pegangannya yaitu UU dan Istana harus bersyukur penegak hukum saat ini bekerja dengan baik. Intinya adalah kegaduhan kemarin sudah berakhir, pergantian Kabar-krim sudah dilakukan,” tandas Bambang Susatyo. (spy,mp),

foto : naefurodjie/parle/hr.

RUU Karantina Integrasikan Beberapa Lembaga Karantina

Anggota Komisi IV DPR Almuzamil Yusuf mengatakan, Rancangan Undang-Undang Karantina akan menjadi sebuah terobosan untuk mengintegrasikan beberapa lembaga karantina yang tersebar di banyak kementerian, menjadi satu badan dengan nama Badan Karantina Nasional (BKN) yang langsung di bawah presiden.

“Selama ini lembaga karantina tersebar di beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai. Karena tidak terintegrasi, maka sering arus birokrasi dan kekuatan penyidikan menjadi lemah,” kata Almuzamil Yusuf.

Politikus PKS tersebut mencontohkan, kekuatan intelijen di lembaga-lembaga karantina di setiap kementerian tidak memiliki kemampuan yang mumpuni secara merata. Baik secara sumber daya manusia (SDM) maupun regulasi.

“Badan Karantina nantinya, harus mampu menjadi penjaga kelestarian hayati nasional. Jangan sampai kekayaan genetik kita di rusak dari luar dan dicuri keasliannya. Tanpa kekuatan SDM dan regulasi, dikhawatirkan Indonesia menjadi negara tanpa antibodi,” tegas Almuzamil Yusuf.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dan sekaligus Ketua Tim Panja RUU Karantina Ibnu Multazam mengatakan, karantina berperan dalam mencegah keluarnya sumber daya hayati asli Indonesia secara ilegal.

Untuk itu, ujar Ibnu Multazam, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak akses untuk perdagangan antar negara juga harus memprioritaskan karantina sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.

DPR RI menargetkan akan menyelesaikan pembahasan



Anggota Komisi IV DPR Almuzamil Yusuf

Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Karantina sebelum diberlakukannya pasar bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015.

“Kami akan berusaha keras untuk menyelesaikan pembahasan RUU Karantina secepatnya. Insya Allah sudah dapat selesai sebelum diberlakukannya MEA,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam usai seminar dengan UGM. (andri,mp), foto : naefuroji/parle/hr.



Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding

Narkoba kini menjadi kejahatan luar biasa, bahkan kejahatan kemanusiaan yang secara sistematis merusak generasi muda penerus bangsa Indonesia. “Hukuman mati menurut saya menjadi hal yang wajar bagi para produsen maupun pengedar narkoba, karena dapat mengakibatkan kerusakan masyarakat secara massal, lebih baik para penjahat narkoba yang dihukum mati,” ungkap anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding saat menjadi narasumber

SUDDING DUKUNG BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA DIHUKUM MATI

Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba oleh PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI di SMAN 65 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (8/9).

Politisi Fraksi Hanura ini menyatakan mendukung tindakan tegas dari Presiden Jokowi yang telah menindak tegas beberapa terpidana hukuman mati terkait barang haram itu namun ia menyayangkan ada pemberian grasi bagi para terpidana narkoba.

Pasalnya, lanjut Sudding, Indonesia sekarang ini bukan lagi pasar, tetapi sudah menjadi produsen narkoba dengan berbagai macam modus untuk menyelundupkan narkoba. “Ini sungguh sangat bahaya,” tekan anggota Komisi III DPR ini.

Menurutnya, dalam pasal UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, mengaitur perlunya peran masyarakat untuk ikut serta melakukan pemberantasan

narkoba, karena sudah sampai pada tahap darurat narkoba.

Untuk itu, kata Sudding lagi, apabila ada masyarakat yang mengetahui namun tidak melaporkan, maka termasuk tindakan pidana. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 UU 35 tahun 2009 bahwa narkoba jika di salah gunakan akan dihukum penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Humas BNN Sudirman mengungkapkan BNN tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan support dari seluruh komponen yang ada. Dengan sendirinya kinerja BNN akan terbantu.

Harapannya, semua masyarakat mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat menjauhi barang haram tersebut. (jk,mp), foto : jaka nugraha/parle/hr.

Harus Ada Perbedaan Tarif BPJS Kesehatan RS Negeri dan Swasta

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani menegaskan, harus ada perbedaan tarif BPJS Kesehatan antara Rumah Sakit Negeri dengan Rumah Sakit Swasta. Pasalnya, biaya operasional RS Negeri ditanggung Pemerintah, sementara RS Swasta harus menanggung sendiri.

“RS Negeri dan Swasta itu berbeda. Jika peneanaan tarif disamakan, mereka keberatan. Itu yang menyebabkan mengapa RS swasta banyak yang tidak mau bekerjasama dengan BPJS,” tegas Irma, saat RDP dengan Direksi BPJS Kesehatan, di Gedung Nusantara I, Senin (7/09/15). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Effendi.

Politikus F-Nasdem ini juga meminta juga ada perbedaan dalam tarif diagnosis penyakit pasien menurut dokter (inasibijis) antara RS Negeri dan Swasta. Sehingga, RS Swasta dapat memaksimalkan kinerja dan servis kepada peserta BPJS.

“Saya sudah menyampaikan kepada

Menteri Kesehatan, harusnya dievaluasi bisa tidak jika tarif inasibijis dibedakan untuk RS swasta dan negeri. Ini suatu ketidakadilan, makanya RS swasta tidak mau karena mereka merasa dirugikan. Ini bukan dari BPJS, justru dari Pemerintah. Harus dikaji kembali,” tegas Irma.

Politikus asal daerah pemilihan Sumatera Selatan ini juga menyoroti sulitnya mekanisme pendaftaran untuk menjadi Anggota BPJS. Ia meminta, syarat yang diberikan kepada masyarakat jangan dipersulit.

“Harapannya agar BPJS bisa bekerja maksimal untuk meng-cover masyarakat Indonesia agar ketika sakit tidak kesulitan saat berobat, obat sesuai dengan penyakitnya, dan tidak kesulitan dalam mendaftar menjadi anggota BPJS. Karena Presiden sudah menyampaikan, bahwa seluruh rakyat harus discover,” pesan Irma.

Sementara itu, Anggota Komisi IX



Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani

Marwan Dasopang (F-PKB) menilai, implementasi BPJS Kesehatan masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Ia mengaku, banyak masyarakat di daerahnya yang belum memiliki kartu BPJS. Belum lagi, akibat tidak memiliki kartu BPJS, tidak dilayani secara maksimal.

“Bagi yang tidak mempunyai kartu, tidak diberikan pelayanan yang baik.



Layanan dokter terjadi diskriminasi kelas dalam fasilitasnya. Misalnya dengan membagi rakyat kelas per kelas dalam urusan kesehatan, dan kesalahan ini berada di dalam sistematis pihak BPJS,” tegas politikus asal dapil Sumut itu.

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, metode *Diagnosis-Related Group* (DRG) merupakan metode pembayaran paling baik. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan metode prospektif untuk pembayaran klaim biaya kesehatan dengan menggunakan sistem INA-CBG.

Sistem ini menggunakan dasar paket kelompok diagnosis.

“Metode ini sebaiknya dipertahankan dengan kondisi yang baik, dengan memperbaiki tenaga medis, manajemen RS, farmasi, dan keperawatan. Ketersediaan obat – obatan harus lebih dioptimalkan, dan sekarang sedang dalam proses perbaikan,” jelas Idris.

Idris menambahkan, Peraturan BPJS dalam UU No.2 tahun 2015, dalam tarif perlu diadakannya sosialisasi. Hasil temuan di lapangan, untuk berjalannya BPJS, tidak terlibatnya Kepala daerah,

Bupati, Walikota, Gubernur dalam penyelenggaraan BPJS.

“Padahal mereka termasuk bagian pemerintah yang sangat peduli dalam hal kesehatan. INA CaBG merupakan anggaran yang baik, agar mencegah dokter yang bekerja seandainya sehingga bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan,” lanjut Idris, sambil memohon dukungan dari DPR untuk meningkatkan pelayanan mutu dan mekanisme maupun sistem yang seharusnya. (sf,ctr) foto: jaka/parle/hr

DPR: Revisi UU Jasa Konstruksi Untuk Hadapi MEA

Ketua Panja Revisi RUU Jasa Konstruksi (Jaskon) Rendy Lamadjido (F-PDI Perjuangan) mengatakan revisi UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diharapkan mampu memberikan solusi untuk pengaturan masalah kontraktor-konstruksi khususnya terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Joko Widodo-JK ke depan.

Hal itu disampaikan Rendy dalam acara Forum Legislasi bertajuk Revisi UU Jasa Konstruksi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/15). Selain Rendy, hadir pula Anggota Komisi V DPR Jazilul Fawaid dan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Yaya Supriyatna sebagai pembicara.

Menurut Rendy, revisi UU No.18/1999 tentang Jaskon ini, bertujuan agar penyelenggara konstruksi (kontraktor), baik pemerintah (BUMN), dan swasta, dalam maupun dari luar negeri, harus diatur dan UU ini menjadi prioritas bagi DPR.

“Maka UU ini harus memberi jaminan atas konstruksi, antara lain soal penguatan modal dan persaingan di dunia global (ASEAN), izin, usaha, kapasitas modal, dan khusus sertifikasi agar ada kerjasama dengan badan sertifikasi pemerintah,” kata Rendy.

Di tempat yang sama, Jazilul menilai keberadaan perusahaan jasa konstruksi nasional sudah harus diperkuat, untuk menghadapi kian ketatnya kompetisi perusahaan konstruksi menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satunya dengan melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

“Latar berlakang revisi ini lebih karena kepentingan nasional. Apalagi menghadapi MEA, maka wajar sektor konstruksi mengikuti perkembangan dunia,” ungkap politikus F-PKB itu.

Jazilul mengatakan bahwa kompetisi perusahaan konstruksi nasional, baik BUMN maupun swasta dan asing diprediksi makin ketat. Makanya perlu diperinci mana saja yang akan diperkuat untuk perusahaan nasional.

“Masalahnya perusahaan konstruksi asing itu modalnya cukup kuat. Begitu MEA, mereka masuk ke Indonesia. Oleh karena itu revisi UU ini harus memberikan berbagai jawaban dan tantangan ke depan,” ujarnya.



Ketua Panja Revisi RUU Jasa Konstruksi Rendy Lamadjido dalam acara Forum Legislasi

la mengakui beberapa perusahaan konstruksi nasional terutama BUMN masih membutuhkan penguatan modal, alias Penyertaan Modal Negara (PMN). “Artinya perlu penguatan untuk kompetisi global. Saya sendiri melihat UU Jasa Konstruksi yang lama cenderung hanya melindungi bangunan pemerintah, belum menjangkau bangunan swasta,” jelas politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu.

Namun Jazilul mengaku khawatir dengan banyaknya pungutan yang akan dibebankan perusahaan jasa konstruksi dalam mendapatkan sertifikasi. “Karena banyak seleksi, jadinya banyak yang diloloskan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), Yaya Supriyatna menyampaikan apresiasi terhadap DPR yang telah menyetujui revisi UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Alasannya, karena draf revisi UU tersebut sangat mendorong jasa konstruksi nasional dan lokal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

“Revisi UU Jasa Konstruksi ini adalah inisiatif DPR. Setelah Kemenpupera mempelajarinya, ada sebuah terobosan baru menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni mendorong jasa konstruksi nasional dan lokal untuk ambil bagian lebih besar,” kata Yaya.

Untuk sebuah pengerjaan konstruksi di tingkat provinsi yang dibiayai oleh APBD, misalnya, menurut Yaya, gubernur diberi hak untuk menentukan kontraktor lokal sesuai per-

syarat dan kualifikasi pekerjaan. “Ini sebuah terobosan dari DPR,” tegasnya.

Begitu juga halnya dengan pekerjaan konstruksi proyek-proyek nasional yang dibiayai APBN, revisi RUU ini, ujar Yaya menegaskan, harus dikerjakan oleh kontraktor nasional sebagai wujud membangun daya saing konstruksi nasional dan lokal.

Hal yang lebih menjanjikan, setiap kontraktor asing yang membuka usahanya di wilayah Indonesia harus bermitra

dengan kontraktor nasional atau lokal sesuai dengan kualifikasinya. “Artinya dalam setiap pekerjaan konstruksi akan terjadi pembagian kerja dengan kontraktor nasional atau lokal,” katanya.

Karena itu, pemerintah, kata Yaya, sangat berharap agar RUU ini selesai dalam tahun 2015 ini. “Paling tidak sebelum MEA diberlakukan, RUU ini sudah disahkan jadi UU,” pungkasnya. (nt) foto: rizka/parle/hr

DELEGASI INDONESIA DUKUNG KOMUNITAS ASEAN YANG BERORIENTASI MASYARAKAT

Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani minta kepada seluruh delegasi pada Sidang Umum ke 36 AIPA untuk mengangkat isu yang menyentuh dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat, seperti misalnya perlindungan pada buruh migran.

“Kami menilai tema yang diangkat pada Sidang Umum ke 36 AIPA sangat tepat. AIPA sebagai mitra dari pemerintah dan parlemen harus berpartisipasi dalam isu-isu yang menyentuh dan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Seperti perlindungan pada buruh migran,” papar Yanti saat Rapat Pleno Sidang Umum ke 36 AIPA di Kualalumpur, Malaysia, Selasa (8/9/2015)

“Kami yakin, bahwa kita tidak bisa bicara tentang kesejahteraan rakyat ketika kita tidak bisa melindungi kehidupan pekerjaannya,” tambah Yanti.

Menurutnya, komunitas ASEAN harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat. ASEAN yang berorientasi pada masyarakat seharusnya juga mengutamakan upaya perlindungan HAM, demokrasi, penegakan hukum, keamanan dan stabilitas regional, serta memprioritaskan pemberantasan kemiskinan.

Dalam rapat pleno yang dipimpin Presiden AIPA terse-



Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani dalam Sidang AIPA

but, Yanti menyatakan bahwa di bawah pemerintahan baru, Indonesia akan terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk pembentukan komunitas ASEAN, termasuk dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan kawasan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Asia Tenggara.

“Berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial, keragaman budaya dan pluralisme merupakan aset untuk membangun Komunitas ASEAN yang unik dan inklusif. Kami percaya bahwa pembentukan Komunitas ASEAN akan mendorong terciptanya kawasan yang harmonis, damai, dan sejahtera,” jelasnya. (sc) foto: suci/parle/hr



Suasana Pertemuan Komisi XI DPR dengan perusahaan pertambangan batubara dan jajaran Kemenkeu

Komisi XI DPR RI meminta masukan atas Revisi Undang-Undang tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada perusahaan pertambangan batubara dan jajaran Kementerian Keuangan, di Provinsi Kalimantan Timur. (03/09/2015).

DPR mengharapkan agar PNBP ini disederhanakan, anggota Komisi XI Andreas Edi Susatiyo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/F-PDI) dirinya mengharapkan dapat menggunakan *one single gate* atau kebijakan satu pintu, sehingga tidak ada tumpang tindih.

Komisi XI Himpun Masukan Revisi UU PNPB

Menurutnya, waktu UU PNPB dibuat belum ada Otonomi Daerah. “Sekarang ada Otonomi Daerah, sehingga saya mengharapkan bahwa melalui revisi UU ini maka adil bagi Pemerintah tapi juga adil bagi dunia usaha,” kata Andreas.

Setelah mendapat masukan pada pertambangan batubara, ternyata yang disebutkan dalam perjanjian sudah termasuk pajak daerah, sekarang realisasinya masih dipungut pajak-pajak lain.

“Sehingga kita akan menyatukan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan yang dipungut Pemerintah pusat, dengan harapan *one gate* ini, dapat diawasi dan sekaligus mengoptimalkan potensi-potensi PNPB,” kata Andreas. (as) foto: agung/parle/hr

Penyaluran BOPTN Harus Dioptimalkan

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan salah satu langkah strategis dalam menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN. Sehingga, penyaluran BOPTN harus dioptimalkan, sesuai dengan amanat Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi X DPR Sutan Adil Hendra, usai RDPU antara Panja BOPTN Komisi X dengan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Universitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Univeristas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Dirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji, di Gedung Nusantara I, Selasa (8/09/15).

“Dengan adanya BOPTN ini, dan amanat UU No 12 Tahun 2012, hal ini untuk membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Dengan adanya BOPTN ini tentu beban orang tua membiayai kuliah anaknya bisa diringankan. Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar besaran BOPTN ini dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan

pagu yang ada,” kata Sutan.

Namun yang menjadi catatan politikus F-Gerindra ini yakni, penyaluran BOPTN ini tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan. Belum lagi masalah penyaluran yang kadang masih terjadi keterlambatan. Sehingga perlu ada solusi agar penyaluran dapat tepat waktu.

“Penyerapan ini kita harapkan bisa dilakukan secara transparan. Permasalahan yang selama ini dihimpun oleh Panja BOPTN akan dirumuskan oleh Panja, kemudian akan dicari solusinya, dan kita sampaikan kepada kementerian terkait,” imbuh SAH, panggilan akrab Sutan.

Politikus asal daerah pemilihan Jambi ini juga berjanji, Panja akan memperbaiki sistem BOPTN yang masih bermasalah, sehingga ke depannya BOPTN ini efektif, efisien, tepat waktu dan tempatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Mujib Rohmat (F-PG) juga mengatakan, Panja BOPTN akan memformulasi rumusan BOPTN, hingga penyaluran BOPTN sehingga dapat berkeadilan.

“Kebijakan BOPTN penting dan kami dorong setiap tahun agar ditingkat-



Anggota Komisi X Sutan Adil Hendra

kan,” imbuh Mujib.

Sementara itu sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia memaparkan bahwa penyaluran BOPTN pada tahun 2013-2014 berjalan dengan baik, namun pada tahun 2015 terjadi sedikit perbedaan, karena pembiayaan sarana dan prasarana digabung kedalam BOPTN.

Kemudian, Wakil Rektor UGM menyatakan terima kasih atas disalurkan BOPTN. Ia juga mendorong agar BOPTN bukan hanya diteruskan, tapi juga ditingkatkan. “Kami mendorong agar BOPTN tidak hanya diteruskan tetapi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah meringankan beban kami dan mahasiswa,” kata Wakil Rektor. (sf,dhi, ctr), foto : jaka/parle/hr.

Revisi UU Karantina, Komisi IV Jaring Masukan Pakar UGM



Pimpinan Komisi IV DPR

Komisi IV DPR RI meminta masukan dari sejumlah pakar dan akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta terkait revisi UU no.16/1992 tentang Karantina. Kegiatan dirancang dalam *Focus Group Discussion* (FGD) melibatkan mitra kerja yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

“RUU Karantina menjadi isu strategis, terutama karena menyangkut gagasan Komisi IV DPR RI mengenai perlunya dibuat Badan Karantina Nasional yang langsung berada di bawah Presiden,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Ibnu Multazam dalam pertemuan di Fakultas Kehutanan, UGM, Yogyakarta, Senin (7/9/15).

Ia menambahkan RUU Karantina diperlukan sebagai payung hukum pembentukan Badan Karantina Nasional (BKN) yang bertugas melindungi kelestarian keanekaragaman sumber daya alam hayati Indonesia. Badan itu dianggap sangat strategis untuk menangkal masuknya benih atau bibit hewan, ikan, dan tumbuhan impor yang tidak

memenuhi syarat teknis kesehatan hewan dan tumbuhan sehingga membawa wabah virus atau bakteri berbahaya di dalam negeri.

Gagasan itu muncul karena saat ini lembaga karantina yang ada dinilai kurang maksimal bekerja, selain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) juga karena dengan adanya dua lembaga karantina seperti yang selama ini bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Terungkap dalam diskusi jaring aspirasi RUU Karantina, sejumlah hal yang selama ini memang belum diatur dalam UU Karantina. Bagi Prof. DR. Ir. Djoko Marsono, pakar Sumber Daya Alam Hayati UGM keberadaan intelijen sangat diperlukan dalam hal perlindungan hewan, ikan dan tumbuhan atau kekayaan hayati dalam negeri.

“Keterlibatan intelijen dalam UU Karantina diperlukan untuk mencegah pencurian spesies asli Indonesia. Pencurian kekayaan hayati dalam negeri sangat mungkin dilakukan oleh pihak asing untuk kepentingan pelemahan daya saing komoditas lokal,” tekan dia.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM Satyawan Pudyatmoko mengapresiasi inisiatif DPR menyusun RUU Karantina karena kebutuhan perlindungan eksistensi tumbuhan serta satwa dalam negeri. “Dengan begitu dapat menangkal masuknya spesies tumbuhan maupun satwa yang berpenyakit atau invasif terhadap satwa atau tumbuhan dalam negeri,” tuturnya.

Selain itu, pembentukan Badan Karantina Nasional juga diharapkan memiliki fungsi sebagai alat politik perdagangan internasional. Dengan demikian, Indonesia juga memiliki daya tangkal terhadap serbuan produk impor yang memiliki dampak ekonomi nasional.

Dalam kunjungan kerja Ibnu Multazam yang juga Ketua Tim Panja RUU Karantina didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi dan sejumlah anggota tim dari Fraksi Partai Golkar, PKB, Hanura, Demokrat, PAN, PPP, PKS, PDI P, Gerindra dan Nasdem. (andri/iky) foto: andri/parle/hr

PIA GELAR PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA



Wakil Ketua Umum PIA DPR RI, Grace Fadli Zon memberikan sambutan di depan Siswa-siswi SMAN 65 Jakarta Barat

Narkoba menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar menjadi pangsa pasar terbesar bagi penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum PIA (Persaudaraan Isteri Anggota) DPR RI, Grace Fadli Zon sesaat usai menggelar penyuluhan

pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di SMAN 65 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (8/9).

“Narkoba menjadi ancaman yang luar biasa bagi Indonesia, karena sudah masuk dalam makanan dan minum, sehingga tanpa disadari generasi muda larut dalam bahaya tersebut,” ungkap Grace.

Dilanjutkannya, kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas anak muda Indonesia, dan akhirnya juga mempengaruhi nasib bangsa ke depan. Untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberlangsungan bangsa, maka PIA bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan akan bahaya narkoba.

Tentu tujuan mulia dari PIA ini tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa didukung oleh kerjasama dari Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, sekolah, orangtua dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu Grace yang didampingi oleh Ketua Panitia Penyelenggara Penyuluhan Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Lina Tampubolon mengajak seluruh pihak untuk peduli atas bahaya laten narkoba yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia.

Selain bertujuan melakukan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba, Lina juga menambahkan bahwa kegiatan PIA bertemu langsung kepada masyarakat khususnya generasi muda, untuk lebih memperkenalkan DPR RI sebagai lembaga tinggi negara disertai dengan segala tugas dan fungsinya. Ia berharap ke depan PIA dapat menggelar acara mulia ini. (Ayu), foto: jaka nugraha/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Almasyhari

Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyhari memastikan pihaknya akan segera membentuk Panitia Kerja (Perfilman). Diharapkan, dengan panitia ini, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di industri perfilman.

“Aspirasi mengenai perfilman ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Kerja,” kata Kharis, usai menerima aspirasi dari Badan Perfilman Nasional dan Insan Perfilman Nasional, di Gedung Nusantara I, Senin (7/09/15).

Terkait kurang diminatinya film nasional oleh masyarakat, Kharis menilai karena kurangnya komunikasi dan promosi dari produsen film. Tak dipungkiri, hukum pasar sangat berpengaruh terhadap perkembangan film Indonesia.

“Soal ini, berlaku hukum pasar. Jika film itu bagus, maka akan disukai pasar. Mungkin film kita kurang diminati karena kurangnya promosi, sehingga

Komisi X Akan Bentuk Panitia Kerja Perfilman

masyarakat luas kurang mengetahui bagusnya film itu. Jika masyarakat sudah terpapar promosinya, kemudian banyak penonton yang menonton,” analisa Kharis.

Politikus F-PKS ini menilai, semua kualitas film Hollywood sebenarnya tidak selalu baik. Namun karena ada brand (merek) besar Hollywood, yang selalu membuat masyarakat antusias untuk menontonnya. Walaupun kadang, ada penonton yang kecewa setelah menonton.

“Perlu adanya komunikasi di insan perfilman, bahwa film produksinya perlu dan penting untuk ditonton. Sehingga ketika penonton itu puas menonton, akan menjadi *multiplier effect* kepada calon penonton lain,” imbuh Kharis.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini juga melihat, dukungan Pemerintah terhadap industri perfilman masih sangat minim. Padahal, dengan adanya industri film ini turut membangkitkan ekonomi kreatif dan menyerap ribuan tenaga kerja.

“Sekolah perfilman masih sangat minim. Mereka (insan perfilman, RED) lahir dari lapangan. Perhatian Pemerintah untuk menghadirkan sekolah perfilman, perlu kita tumbuh kembangkan di seluruh Indonesia,” imbuh politi-

kus yang baru sepekan dilantik menjadi Wakil Ketua di Komisi X itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Venna Melinda menilai, permasalahan paling krusial dari dunia perfilman adalah belum adanya Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

“Sudah enam tahun semenjak UU ini disahkan, kita tidak memiliki PP-nya. Kita harus pahami, di UU ini hanya ada pakemnya saja, kalau bicara teknis, ada di PP,” tegas Venna.

Politikus F-PD ini menegaskan, Pemerintah perlu menumbuhkan pentingnya kehadiran film bagi Indonesia. Sehingga, perlu adanya Direktorat Jenderal khusus untuk menangani hal ini.

“Masalah perfilman ini adalah jati diri bangsa. Sehingga, perlu ada Dirjen khusus yang menangani perfilman. Sehingga akan lebih fokus,” saran Venna.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur ini meminta Komisi X untuk mendorong Pemerintah agar lebih fokus pada industri perfilman. Salah satu hal yang dapat dilakukan Pemerintah adalah segera melahirkan PP. Venna juga mengapresiasi terkait rencana dibentuknya Panitia Kerja Perfilman. (sf,skr), foto : jaka nugraha/parle/hr.

Penegakan Hukum Ke Atas dan Ke Bawah Harus Sama Tajamnya



Suasana Raker Komisi III DPR dengan Jaksa Agung

Dalam penegakan hukum baik ke atas maupun ke bawah, Kejaksanaan Agung diminta sama tajamnya. Tidak peduli siapa itu orangnya apakah anggota DPR, Kepala Daerah, aktivis sekalipun.

“Penegakan hukum kalau diumpamakan memegang pedang, betul-betul tajam ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah,” demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Herman Heri pada Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Senin (7/9).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Herman menambahkan, yang dipantau Jaksa Agung Prasetyo, adalah pribadi yang profesional meski belum bisa dipastikan keprofesionalannya.

Menurutnya, dalam menjalankan penegakan hukum terutama tindak pidana korupsi, sebilah pedang pemberantasan ada di tangan Jaksa Agung, dan mau ditebaskan

kemana. “Ada kekhawatiran dari pihak-pihak lain yang bukan sepele dengan Jaksa Agung. Ini yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Ketakutan itu lanjut Herman, sampai sekarang masih ada. Di lapangan masih ada yang menyalahgunakan dana partai berasal dari dana APBN dan itu dianggap kerugian negara. Namun kesemuanya itu adalah kewenangan Jaksa Agung. Untuk itu Jaksa Agung harus membuktikan tidak berpihak kemanapun dan yang dipengang adalah amanah rakyat.

Sementara Ketua Rapat Benny K Harman meminta Jaksa Agung segera menangani kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus dugaan tindak pidana korupsi Dahlan Iskan, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cecis atau jaminan hak tagih oleh Badan penyelenggaraan Perbankan Nasional (BPPN) berupa penggeledahan PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) serta kasus-kasus aktual lainnya. *(spy,mp)/foto:naefurodji/parle/iw.*

BUTON BERPOTENSI JADI KEK PARIWISATA



Penyambutan kedatangan Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI di Provinsi Sulawesi Tenggara

Potensi aset cagar budaya dan jejak sejarah yang terdapat di Kota Baubau sebagai wilayah pusat pemerintahan eks Kerajaan/Kesultanan Buton dimasa lampau akan membuka peluang menjadikan Kota Baubau masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus bidang Pariwisata.

“Namun untuk itu diperlukan sebuah regulasi yang diatur dalam Undang-undang Kebudayaan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam saat pertemuan dengan Walikota Baubau AS Tamrin, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun dan sejumlah pejabat lainnya, Rabu (9/9/2015).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh, pihaknya berani menjamin jika Kota Baubau akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata karena telah memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan.

“Kalau Undang-undang Kebudayaan sudah kita tetapkan, nantinya kita akan dorong lagi Undang-undang Benteng

Kraton sebagai kawasan khusus termasuk Candi Burobudur di Jawa Tengah. Tentu muara ini semua bisa berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun mengatakan, Kerajaan Buton kaya akan budaya tua. Bila merujuk dari pelantikan raja pertama, Wakaka hingga berakhirnya pemerintahan Kesultanan Buton pasca bergabung dengan NKRI sekitar tahun 1960 maka budaya Kerajaan/Kesultanan Buton telah berusia lebih dari 600 tahun.

“Makanya sangat relevan dengan kunjungan Komisi X DPR RI khususnya dalam pengembangan potensi kebudayaan yang dimiliki daerah eks Kerajaan/Kesultanan Buton,” paparnya.

Bupati Buton berharap dengan peran pemerintah pusat, maka akan mengangkat nilai-nilai budaya yang dimiliki daerah eks Kesultanan Buton sebagai khasanah budaya di nusantara. Mengingat jejak Kerajaan Buton merupakan salah satu yang mendominasi di nusantara diharapkan menjadi pintu masuk agar bekas daerah eks Kesultanan Buton bisa dijadikan sebagai kawasan khusus pengembangan pariwisata dan kebudayaan Indonesia.

Ditempat yang sama, Walikota Baubau AS Tamrin menjelaskan, Benteng Kraton Buton memiliki luas 3 hektar dan menjadi satu-satunya benteng yang unik. Karena didalamnya terdapat pemukiman masyarakat yang membentuk satu wilayah kelurahan. Selain dalam kawasan Benteng Kraton juga ada kawasan penyangga yang berada di luar kawasan Benteng Buton.

Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI yang berkunjung ke Kota Baubau sebanyak 8 orang anggota, yakni Ridwan Hisjam, Isma Yatun, MY Esti Wijayati, Bambang Sutrisno, Lucky Hakim, Krisna Mukti, dan Ferry Kase. *(iw) foto: iwan armanias/parle/iw*

Banyak Anggaran Mubazir di Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mubazir setiap tahunnya karena tidak terserap dengan optimal oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit melihat, penyebab rendahnya peran belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah akibat buruknya koordinasi lintas kementerian atau lembaga (K/L).

“Kita masih melihat masih lemahnya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga. Misalnya Kementerian Pekerjaan

Umum, membangun jalan yang diperuntukan untuk menunjang pelabuhan, tapi pelabuhannya belum dibangun,” kata Supit ketika membuka rapat kerja dengan sejumlah menteri ekonomi Kabinet Kerja, Senin (7/09/15).

Tak dipungkiri, lanjut Supit, setiap tahunnya ditemukan banyak anggaran yang mubazir karena masalah komunikasi antar Kementerian dan Lembaga. Untuk itu, Supit menegaskan, Banggar akan semakin rajin memanggil para menteri ekonomi untuk hadir dalam rapat kerja pembahasan anggaran K/L.



Rapat Badan Anggaran

Namun jika sebelumnya Banggar hanya memanggil menteri dengan anggaran paling besar, Supit memastikan, ke depannya Banggar akan memanggil seluruh kuasa pengguna anggaran APBN.

“Tapi kemudian kita melihat ini ada yang urgen, jadi sekarang kita hadirkan semua kementerian dan lembaga

terkait,” imbuh politikus F-PG ini.

Supit menambahkan, penyerapan anggaran yang rendah menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga separuh semester II. Untuk itu, Supit meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memberi komando kepada kementerian

di bawah koordinasinya untuk lebih aktif membelanjakan anggarannya agar tercapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen hingga akhir tahun ini.

“Percuma pertumbuhan 5-6 persen tapi penyerapan anggaran rendah dan penyerapan tenaga kerja juga kecil. Kita harus mencapai penyerapan anggaran yang berkualitas,” harap politikus asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan ini kepada Menko Perekonomian.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, penyerapan anggaran Kementerian atau Lembaga di bawah Kementerian Perekonomian hingga 31 Agustus hanya sebesar 34,7 persen atau Rp 78,3 triliun dari total anggaran Rp 225,34 triliun.

“Melihat serapan anggaran tersebut, sektor ekonomi rata-rata masih sangat rendah. Hingga akhir Agustus 2015, serapan paling tinggi mencapai 59 persen, dan yang terendah 18 persen,” jelas Menkeu. (sf)/foto:naefurodji/parle/iw.

Rapat Komisi II DPR Dengan KPU Bawaslu Hasilkan Empat Kesimpulan



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman

Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, di Jakarta, Senin (7/9) hasilkan empat kesimpulan rapat, yang di bacakan oleh Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman.

Kesimpulan pertama, Komisi II DPR telah menerima pokok-pokok penjelasan KPU dan Bawaslu terkait Laporan Terakhir Tahapan Pilkada Serentak 2015, dalam penetapan calon di RDP 7 September 2015 ini.

“Komisi II DPR dapat memahami dengan catatan agar KPU melaksanakan tahapan secara konsisten berdasarkan Peraturan KPU yang telah dibuat KPU sendiri dengan Bawaslu dapat melakukan pengawasan Pilkada secara efektif dan akuntabel,” kata Rambe.

Kedua, berdasarkan penjelasan KPU tentang perincian pasangan calon yang memenuhi syarat sejumlah 789 pasangan calon. Calon dengan latar belakang pekerjaan yang harus mundur dari jabatan berdasarkan UU sejumlah 398 calon.

“Untuk itu Komisi II DPR meminta kepada KPU agar melengkapi data tersebut dengan segala proses yang sudah dilakukan KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi II DPR,” jelas Rambe.

Selanjutnya ketiga, Komisi II DPR meminta KPU selaku penyelenggara Pilkada 2015 untuk dapat menyelesaikan tentang tahapan pencalonan, penetapan pasangan calon, identifikasi permasalahan-permasalahan dalam

penetapan pasangan calon, pelaksanaan pasca penetapan pasangan calon, sengketa Pilkada 2015, daftar dan data pemilih, dan Sistem Aplikasi agar dapat diselesaikan sebaik-baiknya. “Komisi II DPR mengharapkan penyelesaian sengketa pilkada tidak diselesaikan diluar koridor hukum,” terangnya.

Dan keempat, Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu membuat surat edaran kepada jajarannya di semua tingkatan yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah agar KPU melakukan pencermatan ulang dan Bawaslu melakukan pengawasan ulang pelaksanaan verifikasi factual yang dilakukan KPU Provinsi, Kab/Kota baik terhadap calon perseorangan dan pemuktahiran data pemilih yang dianggap tidak di verifikasi sebagaimana peraturan PKPU tentang Verifikasi faktual.

“Komisi II DPR akan meminta evaluasi verifikasi factual tersebut kepada KPU dan Bawaslu pada RDP berikutnya,” ujarnya. (nt), foto : riska arinindya/parle/hr.

MKD DPR SIAP PERIKSA SETNOV DAN FADLI ZON



Ketua MKD DPR Surahman Hidayat

Mahkamah Kehormatan Dewan-MKD DPR RI menerima pengaduan sejumlah anggota dewan yang meminta memeriksa Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam dugaan pelanggaran kode etik. Kehadiran dua pimpinan dewan ini pada

konferensi pers bakal calon Presiden AS dari Partai Republik dinilai telah melanggar etika dewan.

“Iya kita siap memproses pengaduan ini sesuai tata beracara secara efektif dan proporsional. MKD punya mekanisme yang jelas, wartawan dapat mengontrol rangkaian proses pemeriksaan dengan menanyakan perkembangan melalui sekretariat,” kata Ketua MKD, Surahman Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/15).

Ia menambahkan sudah meminta sekretariat dan tenaga ahli untuk memeriksa kelengkapan bahan yang telah disampaikan. Menurut politisi Fraksi PKS ini perlu waktu untuk melakukan kompilasi, untuk mengurai permasalahan yang dilaporkan termasuk apakah kegiatan menghadiri konferensi pers itu direncanakan atau tidak.

“MKD akan meminta keterangan dari para pihak, yang paling terkait

dalam kasus yang dilaporkan adalah para pimpinan yang hadir di sana. Kita akan panggil tapi sejauh ini belum tahu kapan kembalinya,” tuturnya.

Tercatat ada tujuh anggota DPR yang melaporkan dua pimpinan dewan kepada MKD diantaranya Charles Honoris, Budiman Sudjatmiko (FPDIP), Maman Imanulhaq (FPKB), Akbar Faizal (FP Nasdem), Amir Uskara (FPPP). “Kita meminta dua pimpinan DPR ini nonaktif selama proses pemeriksaan,” kata Charles.

Sementara itu dalam penjelasannya anggota MKD DPR Syarifudin Sudding menekankan permintaan nonaktif tidak dapat dipenuhi karena tidak ada kewajiban anggota dewan yang berproses di MKD harus nonaktif. Ia menjamin seluruh proses pemeriksaan nantinya akan berdasarkan Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang telah disepakati bersama. (iky), foto : naefurodjie/parle/hr.

Soal Migrant Worker, WAIPA Terima Usul DPR

Persoalan perempuan dan buruh migran perempuan usulan delegasi perempuan Indonesia disetujui masuk dalam draft resolusi Sidang *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA).

“Kami berfikir, sebagai orang Indonesia dan sebagai negara pengirim buruh migran kita harus meyakinkan betul persoalan perempuan ini penting. Bukan hanya masalah perempuan secara umum tetapi lebih spesifik lagi yaitu masalah buruh migran perempuan,” kata Anggota BKSAP Nihayatul Wafiroh kepada Parleментарia usai sidang WAIPA di Malaysia, Senin (7/9/15).

Lebih lanjut Politikus yang juga menjabat anggota Komisi IX ini mengatakan, Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya mempunyai persoalan-persoalan.

“Itu yang memang kita dorong agar nantinya mereka dalam resolusi ini, selain tentang masalah kesetaraan perempuan juga menyelesaikan masalah-masalah buruh migran perempuan,” papar anggota DPR dari Fraksi PKB ini.

Menurutnya, ini merupakan capaian terbesar Delegasi Indonesia, dalam memadukan persoalan perempuan di dalam draft resolusi pada sidang WAIPA.

Selain menerima usulan delegasi Indonesia, Sidang WAIPA juga menyetujui usul delegasi Thailand tentang bagaimana persoalan responsibilitas dan sensitivitas terhadap perempuan harus masuk dalam kurikulum dan silabus.

“Ini tentang bagaimana kita harus mendidik orangtua dan guru untuk memberikan sensitivitas terhadap kesetaraan gender,” imbuh politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.



Delegasi Parlemen Perempuan Indonesia dalam Sidang WAIPA

raan gender,” imbuh politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur ini.

Ada tiga draft resolusi yang disetujui pada Sidang WAIPA yang dipimpin *Deputy President of Senate Malaysia*, yaitu *Resolution on Recognition of Post-2015 Development Agenda on Gender Equality, Resolution on Promoting a Culture of Respect and the Rights of Women and Girls Towards Inclusiveness*, dan *Resolution on Strengthening Legal Framework to Eliminate Violence Against Women and Children in ASEAN*. (sc), foto : suciati/parle/hr.

Komisi VIII Desak Polisi Tangkap Pembakar Hutan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay menilai kebakaran yang terjadi setiap tahun merupakan kejadian yang disengaja. Oleh karena itu ia mendesak aparat kepolisian segera menangkap oknum-oknum yang sengaja menyebabkan terjadinya kebakaran hutan.

“Diduga ada oknum-oknum yang sengaja membakar hutan untuk mempermudah perluasan lahan perkebunan. Kalau memang tujuannya demikian, saya kira akan lebih mudah diketahui. Karena setelah api padam, mereka yang mau membuka atau memperluas lahan perkebunan akan datang ke bekas kebakaran itu. Aparat kepolisian tentu dengan mudah untuk menyelidiki keterlibatan mereka,” papar Saleh Senin (7/9) di Jakarta.

Kebakaran hutan seperti ini harus benar-benar dihentikan. Sebab, kerugian negara akibat kebakaran ini sangat besar. Apalagi, biaya pemadaman kebakaran itu diambil dari APBN dan APBD yang ada.

Saat Rapat dengan BNPB minggu lalu, Komisi VIII mendapatkan penjelasan bahwa sampai sejauh ini mereka telah mengeluarkan dana siap pakai (DSP) sebesar 350 Miliar. Itu dipergunakan untuk sewa pesawat, helikopter, alat-alat berat, dan juga untuk membuat hujan buatan guna memadamkan hutan.

“Anggaran sebesar itu menurut saya sia-sia jika hanya dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. Apalagi, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda negeri kita beberapa waktu belakangan ini. Dalam konteks itu, pelaku pembakaran hutan bisa dikategorikan sebagai pelaku kriminal. Sudah semestinya pihak kepolisian mengungkap dan membawa para pelakunya ke pengadilan,” ujar Politisi dari Fraksi PAN ini.

Saleh menambahkan sejauh ini Kepolisian cukup hebat dalam menangkap Pelaku teroris, gembong narkoba, dan pelaku kejahatan lainnya, tapi



Ketua Komisi VIII DPR Saleh P Daulay

kenapa sulit sekali menangkap pelaku pembakaran hutan. Apakah ada ‘orang besar’ yang membeking mereka? Pertanyaan itu tidak mungkin keluar jika ada pelaku yang ditangkap. Dan sejauh ini, belum ada kedengaran pelaku yang ditangkap. Padahal, kebakaran hutan ini selalu terjadi setiap tahun,” pungkasnya.

Lebih lanjut Saleh berharap polisi dapat segera menangkap dan menngadili pelaku kebakaran hutan. (Ayu/ foto:naefurodji/parle/iw.

Delegasi Parlemen Perempuan Indonesia Hadiri Sidang WAIPA



Delegasi Parlemen Perempuan Indonesia foto bersama dalam Sidang WAIPA

Delegasi Parlemen Perempuan Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Delegasi, Sarwo Budhi Wiryanti Sukamdani, menghadiri Sidang *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (7/09/15). Delegasi Indonesia juga diikuti oleh Melani Leimena Surhali (F-PD) dan Nihayatul Wafiroh (F-PKB).

Wiryanti Sukamdani mengatakan, agenda WAIPA hari ini, Senin (7/09/15), akan membicarakan masalah kesetaraan gender dan budaya untuk menghormati dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Indonesia mendukung kedua agenda tersebut, apalagi kita sudah memiliki Undang-Undang terkait perempuan ini,” katanya.

Politikus F-PDI Perjuangan ini juga menegaskan, Indonesia selalu dimintai pendapat tentang masalah kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Bahkan kita sudah pernah memiliki Presiden perempuan, dan sebagaimana kita ketahui 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik juga telah terpenuhi,” tambah Wiryanti.

Anggota BKSAP DPR ini juga berharap, 9 negara ASEAN lainnya mengikuti jejak Indonesia. “Masih banyak di negara-negara ASEAN yang belum terlaksana dengan baik masalah ini,” imbuhnya.

Sidang WAIPA dibuka Presiden AIPA yang juga Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Pendik Amin Mulia. WAIPA merupakan serangkaian agenda acara pada Sidang Umum ke 36 AIPA di Malaysia khusus bagi delegasi perempuan parlemen. Pada Sidang WAIPA ini akan dipimpin *Deputy President of Senate* Datuk Doris S. Brodie. (sc) foto:sc/parle/ray



Anggota Komisi III DPR Taufiquloh Hadi

Komisi III DPR melakukan Kunler Spesifik untuk melihat maraknya tenaga kerja asing yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui Batam merupakan salah titik masuk yang sangat tinggi. Kemudian pemerintah mempunyai rencana untuk menggerakkan sektor wisata, salah satunya Batam, setelah Bali dan Jakarta.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Taufiquloh Hadi yang ikut dalam Tim Kunler ke Provinsi Kepri baru-

Komisi III Pantau Maraknya TKA Illegal Masuk Batam

baru ini.

Taufiquloh mengatakan, salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang sangat potensial juga banyak tenaga kerja asing (TKA) yang menggunakan visa turis. Seperti baru-baru ini warga negara Inggris dengan menggunakan visa turis tetapi bekerja di Batam, dan masih banyak tenaga asing di luar Batam melakukan hal yang sama dan belum tertangani.

Selain itu, lanjutnya, para turis bukan hanya sebagai wisatawan akan tetapi bekerja bahkan menjadi instruktur *diving*, membuat film, bahkan banyak yang bekerja menjadi PSK. “Kesemuanya itu ilegal dan itulah

yang sebenarnya kita lihat. Bagaimana penanganannya, Batam menjadi tempat berbagai kegiatan yang dilakukan secara ilegal, dan sudah seharusnya mereka ditangkap, didenda dan dideportasi,” tegas Taufiquloh.

Dia menegaskan kembali agar kepolisian bertindak tegas dan jangan setengah hati. “Tidak mungkin sebuah pulau sebesar Batam tidak bisa dikendalikan. Yang terjadi ada orang keluar masuk Batam bukan penduduk tradisional saja, tetapi pendatang dari daerah lain karena mereka ingin berkunjung ke negara tetangga secara ilegal,” tandas Taufiquloh. (spy), foto : supriyanto/parle/hr.

Pemerintah Harus Konsisten Batasi Penggunaan Mata Uang Asing

Pemerintah diminta untuk konsisten dalam membatasi penggunaan mata uang asing di Indonesia, dan lebih mengutamakan penggunaan rupiah. Apalagi, hal ini juga sudah dianjurkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia. Diharapkan, dengan banyaknya transaksi menggunakan rupiah, akan mendukung kestabilan nilai tukar rupiah.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Djoko Udjianto, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar ekonomi, Anwar Nasution dan Fariq Anwar. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Banggar, Gedung Nusantara II, Kamis (3/09/15), membahas tentang dampak pelemahan rupiah terhadap kondisi ekonomi makro dalam pembahasan RAPBN 2016, serta langkah antisipasi yang dilakukan.

“Pemerintah harus konsekuen dengan pembatasan penggunaan mata uang asing, dan harus diikuti dengan regulasi yang benar dan adanya gerakan moral dari masyarakat. Pemerintah harus konsisten dan membuat

rambu-rambu dalam pembelian mata uang dolar. Setiap transaksi harus menggunakan rupiah,” pinta Djoko.

Politikus F-PD ini yakin, sebenarnya banyak cara untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Dan sebenarnya Pemerintah sudah mengetahuinya. Namun tak dipungkiri, Indonesia juga tak bisa melawan kondisi pasar yang terus bergelolak.

“Penurunan pertumbuhan ekonomi di global juga cukup signifikan. Pertumbuhan yang ada itu hanya di Amerika. Dengan The Fed mengadakan kenaikan bunga, konsekuensinya, mata uang dunia akan melemah,” imbuah Djoko.

Yang dikhawatirkan dari semakin melemahnya nilai tukar rupiah ini, tambah Djoko, diantaranya adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran oleh industri. Pasalnya, jika hal ini sampai terjadi, akan berimbas pada sulitnya pertumbuhan ekonomi kedepannya.

“Kita harus membatasi pengeluaran dolar dan segera menurunkan bunga. Kemudian untuk memacu ekspor, para



Wakil Ketua Banggar DPR Djoko Udjianto

eksportir diberi keleluasaan di perpajakan. Sehingga sedikit bernapas untuk mengurangi PHK,” katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah untuk memberikan keleluasaan perpajakan kepada industri, sehingga roda produksi industri akan terus berputar. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, penjualan industri juga menurun.

“Dengan adanya *supply demand*

yang tidak seimbang ini, produksi turun, sales juga menurun, konsekuensinya perusahaan itu akan kesulitan likuiditas. Maka mau tidak mau harus melakukan PHK,” khawatir Djoko.

Dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, Djoko memastikan pihaknya terus mengingatkan Pemerintah untuk realistis. Salah satunya dalam menentukan besaran asumsi makro RAPBN 2016. Ia meminta, Pemerintah untuk tidak mematok di angka ambisius.

“Kita berkali-kali mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur

BI untuk lebih realistis dalam menentukan besaran dalam asumsi makro. Kita jangan terlalu ambisius, tapi kita harus mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kita harus memberi kepastian bahwa asumsi makro sesuai kondisi real,” tutup politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah ini.

Sementara itu sebelumnya, Fariel Anwar menjelaskan strategi yang dapat diambil Pemerintah untuk memperkuat rupiah diantaranya melalui, pengendalian investasi asing, perketat pinjaman valuta asing, kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI,

dan penurunan BI Rate.

“Pasalnya, BI Rate yg tinggi tidak berpengaruh juga untuk menurunkan kurs rupiah. Kami minta DPR untuk selalu mengingatkan Pemerintah. Kondisi ekonomi saat ini bukan karena fundamental ekonomi lemah, karena memang sudah banyak masalah. Tolong pemerintah fokus,” tegas Fariel.

Anwar menyarankan, untuk mengantisipasi hal ini, BI harus menjalankan kebijakan kurs riil efektif yang dapat merangsang ekspor, dan sekaligus menghambat impor. (sf), foto : andri/parle/hr.

DUKUNG KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI EKSPOR



Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra

Kebijakan Kementerian Perdagangan untuk mendorong diversifikasi ekspor dengan muatan lokal mendapat dukungan dari parlemen. Kebijakan diversifikasi juga dilakukan pada negara tujuan ekspor yang selama ini hanya pada empat negara, AS, Cina, Jepang, dan India.

Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra (dakil Jabar III) mendukung langkah Kemendag tersebut. Menurutnya,

ekspor Indonesia yang masih rendah sekitar 20 persen dari PDB, memang masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan. Dan diversifikasi ekspor ini menjadi salah satu jawaban.

“Kalau ekspor kita baik, akan memberi kontribusi yang baik pada pertumbuhan nasional. Artinya, masyarakat akan bertambah pendapatannya dan negara juga akan bertambah devisa,” kata politisi Golkar ini saat ditemui Parlemen di ruang kerjanya, Kamis (3/9). Ekspor, jelas Eka, merupakan salah satu komponen dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi bersama konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan belanja pemerintah, dikurangi impor.

Produk diversifikasi ekspor yang didorong Kemendag sendiri adalah furniture, kertas, produk turunan minyak kelapa sawit, dan produk turunan karet. Sementara diversifikasi negara tujuan ekspor adalah negara-negara nontradisional seperti Asia Selatan, Asia tengah, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

“Harusnya kita sudah membuka pasar baru ke Afrika dan Eropa, sehingga tidak melulu mengacu pada empat negara, AS, Tiongkok, Jepang, dan India. Akibatnya, kalau terkonsentrasi ya seperti ini, AS sedang mengalami pemulihan ekonomi dan Tiongkok sedang melemah. Ekspor kita jadi sangat rendah. Saya sangat mendukung diversifikasi ekspor tadi.”

Ditambahkan Eka, ekspor Indonesia selama ini masih terkonsentrasi pada produk komoditas dan bahan tambang. Kebijakan diversifikasi itu harus dilanjutkan dengan industrialisasi. Barang-barang komoditas mestinya diolah dulu menjadi industri sebelum diekspor. Bila ini dilakukan, penyerapan tenaga kerja akan lebih tinggi.

“Menurut saya bukan hanya diversifikasi yang dibutuhkan pemerintah, tapi bagaimana mengoptimalkan industrialisasi ekspor kita. Jadi jangan ekspor komoditas, tapi kita olah dulu baru diekspor. Itulah yang saya maksud, ada industrialisasi dalam ekspor kita.” (mh), foto : andri/parle/hr.

KOMISI V MINTA KABUT ASAP SEGERA DITUNTASKAN

Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinan atas semakin meluasnya dampak kebakaran hutan di sejumlah daerah. Kabut asap mulai mengganggu aktivitas bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah diminta menuntaskan permasalahan kabut asap sesegera mungkin.

“Malu kita, negara besar, hutan kita yang luas namun masalah asap saja tidak tertangani. Kita minta pemerintah segera menangani kabut asap ini secepat mungkin dan se-



Komisi V DPR saat meninjau Kantor BMKG di Jakarta

maksimal mungkin,” kata anggota Komisi V Anthon Sihombing usai kunjungan ke Kantor Pusat BMKG di Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/9/15).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan perlu diatur peraturan yang benar-benar memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang membakar hutan. Menurutnya lemahnya sanksi dan penegakan hukum membuat masalah kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan terjadi setiap tahun.

“Kejadian ini sangat ironis karena musim kemarau masih berkelanjutan bisa sampai bulan November dan jika tidak ditangani secara tuntas jelas akan merugikan negara,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah Sumatera masih akan menyelimuti, hal ini akibat titik api yang semakin banyak dan arah angin yang sangat kencang.

Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan sekitarnya, membuat jarak pandang di beberapa bandara di Sumatera menyempit. Hal ini tentu memengaruhi jadwal penerbangan, jarak pandang yang tidak mencapai 700 meter, membuat alat pemandu pesawat atau *instrument landing system* (ILS) tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya, banyak jadwal pesawat yang molor. (skr) foto:ry/parle/ry

LISTRIK MASUK DESA DIGANGGU OKNUM KOMISI VII BERTINDAK



Tim Kunspek Komisi VII DPR saat pertemuan dengan PLN, SKPD dan DPRD Jember

Permasalahan listrik masuk desa di Jember, Jawa Timur tidak kunjung usai. Bahkan semakin berbelit karena adanya dugaan oknum yang bermain di lingkungan desa maupun kemungkinan dari kalangan PLN. Anggota Komisi VII DPR RI akhirnya turun langsung ke Jember untuk mengetahui sejauh mana persoalan tersebut saat ini. Pertemuan antara DPR RI, pihak PLN, SKPD dan DPRD Jember Komisi B dilaksanakan di ruang rapat Pemkab Jember Rabu (2/9).

Persoalan listrik masuk desa untuk masyarakat kecil 450-900 watt yang seharusnya memakai biaya pokok sesuai ketentuan yaitu 450 ribu - 850 ribu rupiah, ternyata pada pelaksanaannya dipungut sampai 4 juta rupiah. Hal ini terjadi di Dusun Baban, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

“Inilah yang membuat kita prihatin kalau PLN ternyata tidak bisa mengatasi, padahal itu bagian tanggungjawabnya. Apalagi peraturan-peraturan pemasangan, misalnya mengenai tanggung jawab instalasi dibebankan pada siapa, ketentuan listrik subsidi harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang ternyata bisa dipertanyakan oleh oknum-oknum,” ungkap ketua rombongan tim Kunjungan Spesifik Mohammad Suryo Alam, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur VIII.

Menanggapi hal tersebut Direktur Keuangan PLN Nicke Widyawati mengutarakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pendekatan langsung ke warga di pelosok. Upaya jemput bola ini memang baru dilakukan di beberapa wilayah saja.

Upaya ini dianggap salah satu upaya yang baik, bila juga diikuti sosialisasi yang jelas untuk semua kalangan masyarakat. DPR menyarankan agar PLN memberikan penerangan pada masyarakat tata cara penyambungan, besaran biayanya, persyaratan dan sebagainya yang apabila tidak dipahami warga akan dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mengeruk keuntungan.

“Petugas PLN harus inspeksi orang-orang yang hidup di desa, di pelosok mereka warga negara yang punya hak untuk memperoleh listrik juga. Dan sebenarnya mau bayar juga. Cuma ketidaktahuan mengenai prosedur inilah yg dipertanyakan pihak lain untuk mengambil keuntungan. Kalau PLN berniat mau turun jemput bola ke pelosok ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Bisa meningkatkan keamanan juga untuk pendidikan bahkan kesehatan,” ujar Suryo.

Lebih lanjut DPR menekankan waktu sebulan untuk penyelesaian kasus ini, dikarenakan begitu lamanya masalah ini bergulir padahal listrik adalah kebutuhan yang mendasar. “Tiga puluh hari harus teraliri listrik, tidak boleh dipersulit. Bahkan PLN harus membuat patokan harga seminimal mungkin untuk rakyat jelata, karena mereka bukan objek,” tandas Bambang Harjadi anggota DPR fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur IV meliputi Jember dan Lumajang yang sejak awal mengawasi kasus ini. (ray) foto:ry/parle/hr



Tim Panja RUU Kebudayaan Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisjam disambut Walikota Baubau dan Bupati Buton beserta jajaran, Rabu (9/9). Foto :Iwan Armanias/Parle/HR



Suasana Rapat Badan Anggaran dengan beberapa Kementerian, dipimpin oleh Ahmadi Noor Supit perihal penyerapan anggaran APBN tahun 2015 Rabu, (9/9)
Foto : Jaka Nugraha/Parle/HR



Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Jember, bersama PLN, Pemda dan DPRD membahas Listrik Masuk Desa yang mengalami permasalahan, Rabu (2/9)
Foto: Rizka/Parle/HR

Kunjungan Lapangan Komisi V DPR RI ke Kantor Pusat BMKG Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/9), Foto: Rizka/Parle/HR